

**KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM
UPAYA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING (WNA)**

(Skripsi)

Oleh

RATU FITRIANA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING (WNA)

Oleh

RATU FITRIANA

Kehadiran warga negara asing di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, termasuk Provinsi Lampung. Melihat banyaknya jumlah warga negara asing yang berada di Provinsi Lampung dan banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian, maka pengawasan terhadap warga negara asing merupakan suatu kegiatan yang amat penting untuk dilakukan demi keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung serta instansi terkait, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing dinilai dari indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas biaya, kebutuhan supervisi dan dampak interpersonal sudah dilakukan dengan cukup baik. Adapun kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, kurangnya peran serta masyarakat serta kurangnya koordinasi pihak sponsor ataupun pihak lain yang menjamin keberadaan warga negara asing.

Kata Kunci : Kinerja, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Pengawasan, Hak-hak, Warga Negara Asing.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF IMMIGRATION OFFICE CLASS I OF BANDAR LAMPUNG IN SUPERVISION OF FOREIGN NATIONALS

By

RATU FITRIANA

The presence of foreign nationals in Indonesia every year has increased, including Province of Lampung. The large number of foreign nationals residing in Lampung and the number of cases of immigration offence, so that the supervision against foreign nationals is an important activity carried out for the sake of security and sovereignty of Republic Indonesia.

This research was conducted at Immigration Office Class I of Bandar Lampung and related institutions, namely the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Province of Lampung. The purpose of this research is to gain an overview of the performance of the Immigration Office Class I Bandar Lampung in the supervision of foreign nationals. The methods used in this research was the qualitative approach to techniques of data collection through interviews and documentation.

The results showed that the performance of the Immigration Office Class I Bandar Lampung in the supervision of foreign nationals assessed indicators of quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, needs supervision and interpersonal impacts have already done quite well. As for the obstacles faced was the lack of human resources in the field of surveillance and Immigration Act, the lack of community participation as well as the lack of coordination of parties to sponsor or other party that guarantees the existence of foreign nationals.

Keyword : Performance, Immigration Office Class 1 Bandar Lampung, Supervision, Rights, Foreign nationals.

**KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM
UPAYA PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING (WNA)**

Oleh

RATU FITRIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING
(WNA)**

Nama Mahasiswa

: *Ratu Fitriana*

No. Pokok Mahasiswa

: **1316041057**

Jurusan

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

[Signature]

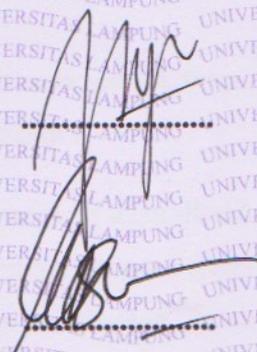
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

NIP. 19750720 200312 1002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.



Penguji : Dra. Dian Kagungan, M.H.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juli 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 02 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



Ratu Fitriana

NPM. 1316041057

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 3 Desember 1994, merupakan anak kedua dari empat bersaudari dari pasangan Bapak Rozali, S.E. dan Ibu Nurhayati. Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2001, melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur tulis (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti berbagai organisasi kampus diantaranya, Himagara, FSPI, Taekwondo, BEM U dan DPM U. Selain itu, peneliti juga pernah menjadi peserta KPN Sail Tomini pada tahun 2015 sebagai salah satu delegasi asal Provinsi Lampung.

MOTTO

“Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Lalu kenapa masih selalu resah menjalani hidup, padahal tahu Allaah yang mengatur segalanya?

Tenang.. Sabar.. Allaah sebaik-baik perencana”

“Yakinlah pertolongan Allaah itu akan datang. Berusahalah, jangan menyerah.

Karena yakinmu pada-Nya akan mengalahkan segalanya”

“Ilmu itu tidaklah didapat dengan jasad yang santai”

(HR. Muslim)

“Ketika ilmu untuk dunia terbalut dengan ilmu untuk akhirat, maka dari sanalah kita mendapatkan kedamaian dari sebuah ilmu pengetahuan”

(Eliyas Yahya Al Fatih)

“Man Jadda wa Jada”

“Bangun kepercayaan dan tingkatkan semangat diri, teruslah bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin”

(Ratu Fitriana)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya di setiap langkah peneliti dalam menjalani kehidupan serta keridhoan-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Maka, dengan ini peneliti persembahkan sebuah karya kepada:

Kedua orang tuaku yang ku sayangi dan ku cintai. Bapak Rozali, S.E. dan Mami Nurhayati. Terimakasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus dan doa yang dipanjatkan, sehingga menjadi penguat semangat bagiku agar tetap kokoh dalam menjalani hidup ini, serta menjadi semangatku dalam meraih cita-cita.

Gustiku Ratna Mustikasari, S.T. dan adik-adikku Revina Sari juga Rasyidah Amany serta keponakanku Raffif, Raina, Rafardhan dan Rasyid, yang telah lama mengisi kehidupanku, terimakasih atas segala keceriaan, kebersamaan semangat motivasi dan doa yang diberikan.

Sahabat-sahabat terbaikku, Sri, Musi, Rosita, Atul, Satasya, Nadia, Puay, Tiara, Riska, Fela, Erfinna, Ajeng, Iis dan Tria yang menemaniku saat suka dan duka, terimakasih telah menjadi saudara seperjuanganku.

Para Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepadaku.

Untuk orang-orang yang ku sayangi dan menyayangiku yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan doa, dukungan serta motivasi.

Almamaterku Tercinta.

SANWACANA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya karena peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing (WNA)” yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allaah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada hamba-Nya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Tanpa pertolongan Allaah skripsi ini tidak mungkin dapat selesai.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Dekan, Bapak-bapak Wakil Dekan, Staff akademik, Staff kemahasiswaan, Staff tata usaha, Staff ruang baca, dan seluruh staff yang ada di Fisip, terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan.
3. Bapak Dedy Hermawan selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta seluruh

Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan sumbangsih berupa ilmu dan pengetahuan bermanfaat, baik akademik maupun moral yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh proses pendidikan.

4. Ibu Novita Tresiana selaku pembimbing utama, terimakasih banyak atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengarahan, kritik serta saran kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini untuk mencapai gelar S1 Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Dian Kagungan selaku dosen pembahas dan penguji, terimakasih banyak telah memberikan kritik dan saran guna perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Meliyana dan Ibu Dian Kagungan selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Kedua orang tua, Bapak Rozali, S.E. dan Mami Nurhayati yang telah banyak berjasa dalam mendidik dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Terimakasih banyak atas segelas doa, nasehat dan dukungan moral serta materi yang telah diberikan dalam hidupku.
8. Gustiku Ratna Mustikasari, S.T. dan adik-adikku Revina Sari juga Rasyidah Amany, terimakasih telah mendoakan dan memberikan nasihat serta dukungan moral kepada Aying selama ini. Dan juga buat keponakan-keponakan ku Raffif, Raina, Rafardhan dan Rasyid yang selalu ngehibur halati ketika lagi BeTe, moga kalian tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha yaa.. aamiin
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung beserta jajarannya juga Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung serta pihak

Bandar, yang telah banyak membantu peneliti memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan kerja samanya selama proses penelitian.

10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 beserta kakanda dan adinda Keluarga Besar Himagara, terkhusus saya ucapkan terimakasih untuk Agnes yang selalu membantu dalam proses penyusunan skripsi, dan tak lupa terimakasih untuk teman sepebimbingan, Dila, yang tiap mau ngadep dosen pembimbing/pembahas selalu barengan, yang seminar hasilnya bareng, pokoknya yang ngalamin proses bimbingan skripsi bareng-bareng, semoga kita bisa sukses bareng-bareng. Aamiin..
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat SMP-ku Sri dan Maya yang setia berteman denganku sampai sekarang, teruslah menjadi bermanfaat dimanapun bumi dipijak. Semoga hubungan kita awet sampai akhirat yaa.. aamiin
12. Terimakasih untuk sista-sistaku Musi, Tasya, Rosita, Atul, Nadia dan Puay yang dari SMA dulu selalu susah seneng bareng-bareng, ngegalauin UN yang 20 paket, yang nyesek bareng-bareng karena gak ada yang diterima SNMPTN, akhirnya sekarang gw bisa wisuda juga broo.. jangan lupain kegilaan kita ya.. hahah
13. Terimakasih untuk my lovely Tiara, Riska dan Fela yang dari semester awal masuk kuliah selalu bareng, walaupun kita beda karakter tapi bisa nyambung kalo ngobrol. Tiara yang sanguinis, Riska yang korelis, Fela yang melankolis, dan gw sendiri Plegmatis. Lengkap banget dah kalo udah ngumpul, saling ngebantuin satu sama lain. Jangan lupain persaudarian kita ya guys..

14. Terimakasih untuk tim “Al-Islah” ada Mba Dewi, Uun, Sumarni, Tria, Ajeng, Happy, Dewi, Fidoh dan Mba Fifah terimakasih ya Ukh, lewat kalian aku bisa ngegali ilmu agama lebih dalam. Jazakumullaah khoiran katsiron, in shaa Allaah awet sampai Jannah Allaah yaa.. aamiin..
15. Terimakasih untuk teman-teman satu atap Tim KKN Periode I 2016 Bang Rio, Mba Jay, Bisart, Uni Jenisa, Dek Riri dan Herze yang selama 2 bulan menemani susah senang di Kampung Mulyodadi, yang sama-sama ngerasain air payau, yang kalo mau minum mesti beli dus, yang kalo mau ke indomaret harus nempuh 2 jam, yang mau ke pasar mesti ke desa sebelah, ngajarin anak-anak TPA, ngelaksanain progja di SDN 01 Mulyodadi bareng-bareng, yang kadang tiap malam minggu berjanjengan dengan warga, ngerewang bareng, naik bentor kemudian nyebur ke got bareng.. hahaha.. Cuma pas KKN tuh yang bisa ngerasain kayak begitu.. walaupun udah kelar KKN, tetep ngumpul bareng yaa..
16. Terimakasih untuk keluargaku di Desa Pelawa Sulawesi Tengah, sempet agak syok ketika mereka ngomong satu sama lain kayak lagi marah-marah padahal enggak, ternyata emang logatnya begitu, hehe.. Dan keluargaku di Kampung Mulyodadi, Rawa Pitu Tulang Bawang yang setia ngerawat kami selaku anak-anak KKN yang kadang nyusahin dan kadang males-malesan.. Terima kasih Pak, Bu semoga kelak bisa kembali mengunjungi kalian di sana. Aamiin..
17. Terimakasih untuk teman-teman organisasiku di PMR SMPN 19 BDL, Paskibra SMAN 10 BDL, FSPI FISIP Unila Periode 2015/2016, Taekwondo Unila, BEM Unila KCK dan MBC, DPM Unila Periode 2016 serta KAKPN yang telah mengajarkan arti kedisiplinan, kebersamaan, kekompakkan dan

masih banyak lagi lainnya. Lewat organisasi tersebut banyak ilmu yang bisa di dapat selain dari akademik. Lewat organisasi temen saya nambah banyak, link makin luas, skill makin terasah, banyak dah pokoknya, gak pernah nyesel ikut organisasi. hehe

18. Terimakasih untuk teman-teman KPN Sail Tomini 2015 dari Sabang sampai Marauke yang telah memberikan pengalaman berharga, susah senang bareng-bareng mengarungi lautan selama kurang lebih 30 hari, terombang-ambing di lautan Indonesia tercinta dengan Kapal kebanggaan KRI Bintuni 520. Waktu 30 hari terlalu singkat buat mengenal kalian dan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Semoga kelak kita bisa sama-sama mengarungi Indonesia kembali yaa.. aamiin..
19. Untukmu yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat, terimakasih telah menjadi sosok berpengaruh dalam hidupku. Namamu selalu ada di hati, walaupun tidak tertulis dalam kertas ini.
20. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian banyaknya bantuan berbagai pihak kepada peneliti, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran guna perbaikan di masa depan adalah mutlak sangat peneliti perlukan. Semoga skripsi ini berguna bagi setiap pembacanya.

Bandar Lampung, 15 Mei 2017

Ratu Fitriana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kinerja	12
B. Tinjauan Tentang Organisasi	13
1. Pengertian Organisasi	13
2. Jenis-Jenis Organisasi	14
C. Tinjauan Tentang Kinerja Organisasi	16
1. Pengertian Kinerja Organisasi	16
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	17
3. Pengukuran Kinerja Organisasi	19
4. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi	20
D. Tinjauan Tentang Pengawasan	23
1. Pengertian Pengawasan	23
2. Tujuan Pengawasan	24
3. Jenis-Jenis Pengawasan	25
4. Karakteristik Pengawasan yang Efektif	27
E. Tinjauan Tentang Orang Asing	28
1. Pengertian Orang Asing	28
2. Hak Orang Asing di Indonesia	29
3. Kewajiban Orang Asing di Indonesia	30
F. Tinjauan Tentang Pengawasan Warga Negara Asing	31
G. Kerangka Berpikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Keabsahan Data	41

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	45
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	48
C. Wilayah Kerja, Struktur Organisasi dan Jumlah Personil Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	49
D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian dan Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	52

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing	57
2. Faktor Kendala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing	77
B. Pembahasan	84
1. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing	84
2. Faktor Kendala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing	92

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang diberikan Bebas Visa Kunjungan	2
2. Data Jumlah WNA di Provinsi Lampung Tahun 2015	7
3. Daftar Informan Penelitian	38
4. Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	33
2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	50
3. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)	63
4. Rapat Koordinasi Tim Pora	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di jalur perlintasan laut Internasional yang menghubungkan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Hal yang jelas bahwa Indonesia dengan posisi geografisnya menjadikan Indonesia sebagai jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional.

Awal tahun 2016 merupakan awal diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) atau sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AEC/ MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dimana penerapannya menggunakan sistem perdagangan bebas antar anggota negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dan turut andil dalam kegiatan AEC/ MEA, negara-negara ASEAN lainnya yang turut andil yaitu

Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.¹

Sejalan dengan kegiatan AEC/ MEA, Presiden Indonesia, Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Tujuan dikeluarkannya Perpres No. 21 Tahun 2016 adalah untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain dengan cara memberikan kemudahan bagi orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memerhatikan asas timbal balik dan manfaat, dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.² Berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa negara penerima Bebas Visa Kunjungan berjumlah 169 negara yang terdiri atas:

Tabel 1. Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang diberikan Bebas Visa Kunjungan

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1	Afrika Selatan	21	Belize	41	Filipina
2	Albania	22	Benin	42	Finlandia
3	Aljazair	23	Bhutan	43	Gabon
4	Amerika Serikat	24	Bolivia	44	Gambia
5	Andorra	25	Bosnia & Herzegovina	45	Georgia
6	Angola	26	Botswana	46	Ghana
7	Antigua & Barbuda	27	Brazil	47	Grenada
8	Arab Saudi	28	Brunei Darussalam	48	Guatemala
9	Argentina	29	Bulgaria	49	Guyana
10	Armenia	30	Burkina Faso	50	Haiti
11	Australia	31	Burundi	51	Honduras
12	Austria	32	Ceko	52	Hongaria
13	Azerbaijan	33	Chad	53	Hongkong

¹ Rikho Jansen, "2016 MEA Dimulai, Pengertian Apa Itu MEA Masih Banyak Masyarakat Indonesia Yang Tidak Mengerti", diakses dari <http://news.hargatop.com/2016/01/04/2016-mea-dimulai-pengertian-apa-itu-mea.html>, pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.15

² Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

14	Bahama	34	Chili	54	India
15	Bahrain	35	Denmark	55	Inggris
16	Bangladesh	36	Dominika	56	Irlandia
17	Barbados	37	Ekuador	57	Islandia
18	Belanda	38	El Savador	58	Italia
19	Belarusia	39	Estonia	59	Jamaika
20	Belgia	40	Fiji	60	Jepang
No.	Nama Negara	No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
61	Jerman	98	Mongolia	135	Slovakia
62	Kamboja	99	Mozambik	136	Slovenia
63	Kanada	100	Myanmar	137	Spanyol
64	Kazakhstan	101	Namibia	138	Sri Lanka
65	Kenya	102	Nauru	139	Suriname
66	Kep. Marshall	103	Nepal	140	Swaziland
67	Kep. Solomon	104	Nikaragua	141	Swedia
68	Kiribati	105	Norwegia	142	Swiss
69	Komoro	106	Oman	143	Taiwan
70	Korea selatan	107	Palau	144	Tajikistan
71	Kosta Rika	108	Palestina	145	Tahta Suci Vatikan
72	Kroasia	109	Panama	146	Tanjung Verde
73	Kuba	110	Pantai Gading	147	Tanzania
74	Kuwait	111	Papua Nugini	148	Thailand
75	Kyrgyzstan	112	Paraguay	149	Timor Leste
76	Laos	113	Perancis	150	Togo
77	Latvia	114	Peru	151	Tonga
78	Lebanon	115	Polandia	152	Trinidad & Tobago
79	Lasotho	116	Portugal	153	Tunisa
80	Liechtenstein	117	Puerto Rico	154	Turki
81	Lithuania	118	Qatar	155	Turkmenistan
82	Luksemburg	119	Rep. Dominika	156	Tuvalu
83	Macao	120	Romania	157	Uganda
84	Madagaskar	121	Rusia	158	Ukraina
85	Makedonia	122	Rwanda	159	Uni Emirat Arab
86	Maladewa	123	Saint Kitts & Navis	160	Uruguay
87	Malawi	124	Saint Lucia	161	Tiongkok
88	Malaysia	125	Saint Vincent & Grenadis	162	Uzbekistan
89	Mali	126	Samoa	163	Vanuatu
90	Malta	127	San Marino	164	Venezuela
91	Maroko	128	Sao Tome & Principe	165	Vietnam
92	Mauritania	129	Selandia Baru	166	Yordania
93	Mauritius	130	Senegal	167	Yunani
94	Meksiko	131	Serbia	168	Zambia
95	Mesir	132	Seychelles	169	Zimbabwe
96	Moldova	133	Singapura		
97	Monako	134	Siprus		

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Semakin terbukanya Indonesia terhadap lalu lintas Internasional, maka jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia pun semakin meningkat, sehingga kewaspadaan terhadap warga negara asing sangat penting dilakukan demi keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Beberapa pengaruh positif yang diberikan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia di antaranya adalah meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain dan dapat meningkatkan devisa negara baik di bidang industri maupun pariwisata. Kehadiran warga negara asing di wilayah Indonesia selama ini tidak hanya memberikan pengaruh positif saja, namun beberapa oknum warga negara asing juga memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, terjadinya arus imigran gelap, penyelundupan barang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional serta meningkatnya sindikat-sindikatis internasional di bidang terorisme, *cybercrime*, narkoba, pencucian uang dan lain-lain.

Menikahi Pribumi merupakan salah satu cara bagi warga negara asing untuk dapat tinggal di Indonesia, seperti yang terjadi di Lampung. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejan) Bandar Lampung Andrie W. Setiawan mengatakan bahwa modus menikahi perempuan pribumi adalah yang paling sering dilakukan oleh warga negara asing yang terungkap. Modus itu dilakukan dengan cara memalsukan dokumen kemudian menikahi perempuan pribumi. Pemalsuan dokumen ini menyangkut syarat-syarat pernikahan. Modus lainnya

adalah dengan berpura-pura mencari suaka atau perlindungan, namun hal itu juga disalahgunakan dengan mencari pekerjaan tanpa visa bekerja yang sah.³

Berdasarkan pernyataan di atas, pengaruh positif yang diberikan oleh warga negara asing tidak sebanding dengan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan, sehingga pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai langkah penunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara.

Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia secara teknis dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait, seperti Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kementerian Agama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kejaksaan Tinggi dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pengawasan terhadap warga negara asing tersebut meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.⁴ Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah pada saat orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁵ Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan,

³ Tri Purna Jaya, "Nikahi Pribumi Jadi Modus WNA Tinggal di Lampung", diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/08/24/340/1471857/nikahi-pribumi-jadi-modus-wna-tinggal-di-lampung>, pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 19.37

⁴ UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2).

⁵ Ibid, Pasal 9 Ayat (1).

bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.⁶

Perlu kita ketahui bahwa salah satu aturan untuk dapat memasuki suatu negara untuk keperluan dan tujuan tertentu, maka seseorang tersebut harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.⁷ Apabila seorang tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan maka dipastikan bahwa yang bersangkutan akan ditolak kedatangannya atau *dideportasi*⁸ ke negara asalnya. Orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk.

Imigrasi memiliki aturan-aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mengatur keluar masuknya warga negara asing menganut prinsip *selective policy*, yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan

⁶ H. Abdullah Sjahriful (James) S.H., *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Yudhistira, 1993), hal. 69.

⁷ UU No. 6 Tahun 2011, *Op Cit*, Pasal 8 Ayat (1).

⁸ Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.⁹

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu instansi yang menangani pengawasan warga negara asing di wilayah Kota Bandar Lampung dan juga 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) wilayah kota lainnya, yakni Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang sedemikian luas dalam melakukan pelayanan dan pengawasan menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung memiliki intensitas tugas yang padat. Hal ini dikarenakan Lampung merupakan salah satu daerah destinasi orang asing untuk berwisata, berinvestasi, bisnis, ataupun untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, pada tahun 2015 total jumlah warga negara asing yang berada di Provinsi Lampung berjumlah 442 orang dengan rincian:¹⁰

Tabel 2. Data Jumlah WNA di Provinsi Lampung Tahun 2015

No.	Negara	Jumlah WNA
1.	Cina	134
2.	Thailand	64
3.	Malaysia	53
4.	Korea	43
5.	Negara Lainnya	148

⁹ Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2008, hal. 2.

¹⁰ Bayu, "Banyak Tenaga Kerja Asing di Lampung Tak Melapor", diakses dari <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=7832>, pada tanggal 27 November 2016 pukul 20.34

Total WNA	442
------------------	------------

Sumber: <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=7832>, diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 20.34

Banyaknya peluang dan kemudahan untuk memasuki wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, mengakibatkan rasio kemungkinan terjadinya pelanggaran izin keimigrasian semakin meningkat, seperti penyalahgunaan visa, izin tinggal yang melebihi batas waktu (*overstay*) dan pelanggaran izin keimigrasian lainnya.

Selama kurun waktu 2012-2015, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung telah berhasil mengamankan sebanyak 108 imigran gelap, diantaranya warga negara Afganistan 20 orang, Banglades 20 orang, Myanmar 35 orang, Pakistan 6 orang, Sudan 7 orang dan Somalia 20 orang.¹¹ Selain imigran gelap, di tahun 2014 lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung telah mendeportasi 6 warga negara asing yaitu, 4 warga negara China karena penyalahgunaan visa, 1 orang warga negara Malaysia dan 1 warga negara Thailand yang *overstay*.¹²

Melihat banyaknya jumlah warga negara asing yang berada di Provinsi Lampung dan banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, maka pengawasan terhadap warga negara asing merupakan suatu kegiatan yang amat penting untuk dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi. Pentingnya pengawasan terhadap warga negara asing harus didukung

¹¹ Henk Widi, "Imigrasi Lampung Amankan Ratusan Imigran Dalam 3 Tahun", diakses dari <http://www.cendananews.com/2015/04/imigrasi-lampung-amankan-ratusan.html>, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 22.03

¹² Agung Ghazaldi, "Dalam 2 Tahun Terakhir, 99 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung", diakses dari <http://rri.co.id/post/berita137531/daerah.html>, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.58

pula oleh kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang optimal dan maksimal.

Menurut Tangkilisan, kinerja organisasi adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya.¹³ Sedangkan menurut Nasucha dalam Sinambela, kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik guna meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan proses yang dilakukan serta hasil kerja yang dihasilkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, visi, misi serta sasaran yang telah disepakati bersama antar individu atau sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan instansi tersebut agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing. Selama ini penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih menitikberatkan pada penilaian kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan paspor dan sedikit mengesampingkan penilaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara

¹³ H.N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 178.

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 186.

asing. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dan menyusun skripsi dengan judul: **“Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing (WNA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan daripada penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Operasional
 - a. Mengetahui secara mendalam gambaran mengenai kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

2. Tujuan Fungsional

Dapat bermanfaat bagi pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung maupun pihak lain yang membaca Skripsi ini dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan penambah wawasan bagi masyarakat luas serta sebagai masukan bagi pemerintah dalam menangani pengawasan warga negara asing di Indonesia, sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep kajian ilmiah dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian mengenai kinerja organisasi publik.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada aparaturnya Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya pengawasan warga negara asing

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.¹⁵ Menurut Mahsun, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah disiapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.¹⁶

Menurut Basri dalam Sinambela, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, kriteria, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama.¹⁷ Sedangkan Robbins dalam Sinambela mendefinisikan

¹⁵ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 7.

¹⁶ Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2006), hal. 25.

¹⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Op Cit*, hal. 6.

kinerja sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.¹⁸

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu proses pencapaian pada diri individu maupun kelompok dalam memenuhi kriteria keberhasilan yang hendak dicapai. Ketercapaian kinerja dapat dilihat dari bagaimana hasil kerja atau prestasi kerja tersebut memenuhi standar nilai, sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah dibentuk.

B. Tinjauan Tentang Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Menurut Sulistiyani dan Rosidah, organisasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang di dalamnya melakukan kerjasama dengan melalui pola hubungan yang bersifat sekunder, sehingga tidak ada terikat kaitan emosional, yang terintegrasi dalam sebuah lingkungan sosial yang lebih luas dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan.¹⁹

Argyris dalam Kusdi mendefinisikan organisasi sebagai suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha banyak orang.²⁰ Sedangkan menurut Griffin dalam Sule dan Saefullah, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.²¹

¹⁸ Ibid, hal. 5.

¹⁹ Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 43.

²⁰ Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 4.

²¹ Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 4.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah yang berisi dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama dan bekerja sama dalam sebuah struktur dan koordinasi yang bertujuan untuk menjalankan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Jenis-Jenis Organisasi

Menurut Kusdi, jika dilihat dari aspek tujuan, produk yang dihasilkan, cara pengambilan keputusan dan ukuran kerja. Secara umum organisasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:²²

- a. Organisasi publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, tidak pada laba (*non profit oriented*).
- b. Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

Menurut Wursanto, organisasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:²³

- a. Organisasi dari segi jumlah pucuk pimpinan. Berdasarkan segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak.
 1. Organisasi tunggal merupakan organisasi yang memiliki pucuk pimpinan di tangan satu orang. Nama pimpinan yang digunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi, misalnya manajer.

²² Kusdi, *Op Cit*, hal. 42

²³ Ignatius Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 60.

2. Organisasi Jamak merupakan organisasi yang pucuk pimpinannya berada di tangan beberapa orang pimpinan yang merupakan satu kesatuan. Nama dari kesatuan pimpinan tersebut tergantung dari jenis dan fungsi organisasi atau lembaga tersebut, misalnya Majelis, Direksi.
- b. Organisasi dari segi keresmian. Menurut keresmian organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal.
1. Organisasi formal adalah organisasi yang kegiatannya dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dan dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut mempunyai struktur yang jelas
 2. Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan serta keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar, dimana kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Tujuan organisasi informal juga tidak dirinci secara tegas dan biasanya organisasi ini bersifat sementara karena pembentukannya tidak didasarkan atas rencana yang matang dan jelas.
- c. Organisasi dari segi tujuan. Berdasarkan segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi niaga/ ekonomi dan organisasi sosial/ kemasyarakatan.
1. Organisasi niaga/ ekonomi adalah organisasi yang memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah melakukan produksi dan mendistribusikan barang dan jasa.

2. Organisasi sosial/ kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari bagaimana tujuan organisasi tersebut dibentuk, produk yang dihasilkan dalam suatu organisasi, jumlah kepala pimpinan serta segi keresmian organisasi tersebut. Secara umum, jenis-jenis organisasi terdiri atas organisasi publik dan organisasi bisnis.

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, tidak pada laba (*non profit oriented*). Bila dilihat dari segi jumlah pucuk pimpinan, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan organisasi tunggal yang memiliki pucuk pimpinan di tangan satu orang yakni kepala kantor imigrasi dan merupakan organisasi formal yang memiliki struktur yang jelas.

C. Tinjauan Tentang Kinerja Organisasi

1. Pengertian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya konsep kinerja dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah

²⁴ UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1.

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.²⁵ Menurut Pasolong, kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.²⁶

Menurut Nasucha dalam Sinambela, kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik guna meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.²⁷ Sedangkan menurut Tangkilisan, kinerja organisasi adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya.²⁸

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan proses yang dilakukan serta hasil kerja yang dihasilkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, visi, misi serta sasaran yang telah disepakati bersama antar individu atau sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Dalam pelaksanaan kinerja, ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri. Menurut Atmoesoeperto dalam Tangkilisan,

²⁵ Herbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 175.

²⁶ Ibid, hal. 375.

²⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Op Cit*, hal. 186.

²⁸ H.N. Tangkilisan, *Op Cit*, hal. 178.

kinerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu:²⁹

a. Faktor internal yang terdiri dari:

1. Tujuan organisasi, yakni apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
2. Struktur organisasi, sebagai hasil *design* antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
3. Sumber daya manusia, yakni kualitas dan pengelola anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
4. Budaya organisasi, yakni gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

b. Faktor eksternal yang terdiri dari:

1. Faktor politik, hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi dalam berkarya secara maksimal.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli yang menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang besar.
3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat yang memengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

²⁹ H.N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hal. 181.

merupakan faktor yang timbul dari dalam organisasi, seperti tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar organisasi, seperti faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial.

3. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/ atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi instansi pemerintah.³⁰ Menurut Mahsun, pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja.³¹

Menurut Mardiasmo dalam Sinambela, pengukuran kinerja organisasi publik memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah (organisasi publik) agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja; (2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan (3) Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.³²

³⁰ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 182.

³¹ Muhammad Mahsun, *Op Cit*, hal. 26.

³² Lijan Poltak Sinambela, *Op Cit*, hal. 187

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk memperoleh penilaian atas hasil kerja yang telah diselesaikan. Tujuan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja adalah untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

4. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi terbaik tersebut yang di dalamnya memuat indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu.³³

Menurut Mahmudi, informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. Informasi kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendali. Indikator bagi tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.³⁴

Lohman dalam Sinambela mengungkapkan aspek-aspek pokok dalam pengukuran kinerja organisasi antara lain:³⁵

³³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2015), hal. 153.

³⁴ *Ibid*, hal. 91.

³⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Op Cit*, hal. 191

- a. Sumber Daya. Sumber daya dapat dilihat dari dua indikator yakni: (a) berbagai biaya yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya distribusi dan sebagainya; (b) *assets* yakni biaya angkut persediaan.
- b. Output. Luaran ini dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: (a) keuangan, yaitu dari sisi penjualan, keuntungan dan *Return on Investment* (ROI); (b) waktu, antara lain waktu menanggapi pelanggan dan ketepatan waktu pengiriman; (c) kualitas yang terindikasi dari keluhan pelanggan dan kerusakan pengiriman.
- c. Fleksibilitas. Fleksibilitas dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (a) fleksibilitas volume yang tercermin dari kemampuan manajemen merespon perubahan atas permintaan; (b) fleksibilitas pengiriman, yang tercermin dari tingkat ketepatan pengiriman; (c) fleksibilitas campuran, yang tercermin dari kemampuan melayani berbagai jenis permintaan; dan (d) fleksibilitas produk baru dan modifikasian, yang tercermin dari kemampuan untuk menciptakan produk baru atau produk yang dimodifikasi.

Mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang unik, organisasi ini memerlukan pengukuran yang luas tidak hanya mengukur tingkat laba, efisiensi atau hanya pada ukuran finansial saja. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun, meliputi enam indikator, yaitu:³⁶

- a. Kelompok masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

³⁶ Muhammad Mashun, *Op Cit*, hal. 31.

- b. Kelompok proses (*process*), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok luaran (*output*), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*), maupun tidak berwujud (*intangible*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Sedangkan indikator/ kriteria kinerja menurut Sulistiyani dan Rosidah, yaitu:³⁷

- a. Kualitas, menyangkut kesesuaian hasil dengan yang diinginkan;
- b. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan baik dalam nilai uang, jumlah unit atau jumlah lingkran aktivitas;
- c. Ketepatan waktu;
- d. Efektivitas biaya, menyangkut penggunaan resorsis organisasi secara maksimal;
- e. Kebutuhan supervisi, menyangkut perlunya bantuan atau intervensi supervisi dalam pelaksanaan pegawai;

³⁷ Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, *Op Cit*, hal. 281.

- f. Dampak interpersonal, menyangkut peningkatan harga diri, hubungan baik dan kerjasama di antara teman kerja maupun bawahan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan dalam suatu organisasi atau analisator untuk mengukur ketercapaian suatu organisasi dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengevaluasi serta memantau kinerja organisasi. Indikator yang peneliti gunakan dalam mengukur kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing adalah indikator yang dikemukakan oleh Sulistiyani dan Rosidah. Adapun indikator tersebut, yaitu: Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan supervisi dan dampak interpersonal

D. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.³⁸ Menurut Siagian, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.³⁹ Mockler dalam Yahya

³⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 216.

³⁹ Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Aksara Bumi, 2007), hal. 125.

mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.⁴⁰

Sedangkan menurut Dale dalam Winardi, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴¹

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan pemantauan atau penjagaan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyelewengan agar tujuan daripada kegiatan yang dilakukan berjalan dengan maksimal.

2. Tujuan Pengawasan

Sukamadi mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah:⁴²

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.

⁴⁰ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 133.

⁴¹ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 224.

⁴² Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan, Lintas Agama*, (Bandung: Humaniora, 2012), hal. 24.

- c. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan lainnya yang terjadi atas tugas dan wewenang.
- d. Supaya sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan.
- e. Meminimalkan biaya.
- f. Untuk memecahkan masalah.
- g. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian, pelanggaran, penyelewengan ataupun masalah-masalah lain yang dapat merugikan organisasi tersebut sehingga nantinya pengawasan ini dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mengatasi masalah atau kelemahan yang timbul.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir, untuk mencapai tujuan negara dan organisasi, maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut.⁴³

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

⁴³ Victor M Situmorang dan Juhir Jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 27.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagiannya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

b. Pengawasan *Preventif* dan Pengawasan *Represif*

1. Pengawasan *Preventif*

Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan di kemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2. Pengawasan *Represif*

Pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga di kemudian hari jangan sampai terulang lagi. Pengawasan dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan *Intern* dan Pengawasan *Ekstern*

1. Pengawasan *Intern*

Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan (dalam kelompok eksekutif sendiri).

2. Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan ekstern, terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada di luar eksekutif.

Pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan terdiri dari tiga bagian, yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan intern dan ekstern.

4. Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Amirullah dan Budiyono, sistem pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik antara lain:⁴⁴

a. Tepat waktu

Sistem pengawasan akan efektif jika dilakukan dengan cepat di saat penyimpangan diketahui. Jika terjadi kelambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Untuk menghindari hal ini perlu dilakukan pengawasan secara rutin, tetapi untuk hal-hal yang sangat penting perlu dilakukan pengawasan di luar kontrol.

b. Dipusatkan pada pengendalian strategik

Pengendalian hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci sehingga penyimpangan di bidang ini dapat segera diketahui dan dapat dihindarkan timbulnya kegagalan pencapaian tujuan.

⁴⁴ Amirullah dan Budiyono Haris, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 307.

c. Terkoordinasi dengan arus kerja organisasi

Memperhatikan bahwa satu kegiatan akan selalu terkait dengan kegiatan lain, maka sistem pengendaliannya juga harus dikoordinasikan dengan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik dari sistem pengawasan yang efektif adalah pengawasan dilaksanakan tepat waktu, dipusatkan pada pengendalian strategik serta terkoordinasi dengan arus kerja dalam suatu organisasi.

E. Tinjauan Tentang Orang Asing

1. Pengertian Orang Asing

Orang asing dalam Kamus Hukum, didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.⁴⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.⁴⁶

⁴⁵ Najarudin Safaat, “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”, Thesis, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 112.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 4.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi orang asing adalah seseorang dan termasuk pula badan hukum asing yang berada di suatu negara, namun kedudukannya bukan sebagai warga negara tersebut.

2. Hak Orang Asing di Indonesia

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, hak tersebut antara lain melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya, kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.⁴⁷

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian, Indonesia juga membuka bidang tertentu untuk perusahaan asing dalam melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang

⁴⁷ Ibid, hal. 2.

angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa hak orang asing yang berada di Indonesia telah dijamin dalam undang-undang, beberapa di antaranya adalah hak untuk melakukan jual beli, melaksanakan perkawinan serta hak untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia juga diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis, namun jumlah bisnis yang didirikan dibatasi, keadaan ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional.

3. Kewajiban Orang Asing di Indonesia

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;

⁴⁸ Ibid, hal. 3.

⁴⁹ Ibid, hlm. 13.

- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan keimigrasian;
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban orang asing yang berada di wilayah Indonesia beberapa diantaranya adalah kewajiban memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri, memperlihatkan surat perjalanan atau paspor serta mendaftarkan diri kembali jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

F. Tinjauan Tentang Pengawasan Warga Negara Asing

Menurut Sihombing dalam Putri, bentuk pengawasan yang dilakukan dalam upaya pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu:⁵⁰

- a. Pengawasan Administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui surat-surat atau dokumen berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan penyajian serta penyebaran informasi secara manual dan elektronik mengenai lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga negara asing.
- b. Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian warga negara asing dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda

⁵⁰ Kiki Ariska Putri, "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda", E-journal Ip Fisip Unmul, Vol 4, No 3, 2016: 995-1008, 2016, hal. 6.

pengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya dalam mengawasi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terbagi atas dua macam, yakni pengawasan administratif melalui surat atau dokumen serta pengawasan lapangan berupa pemantauan dan patroli.

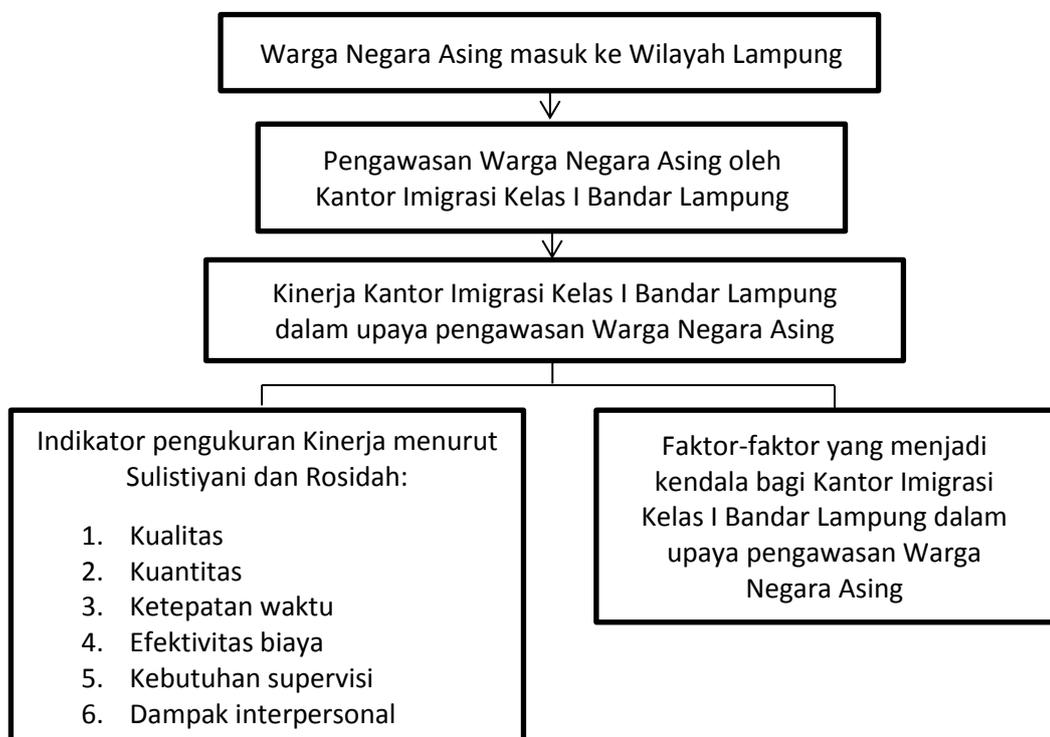
G. Kerangka Berpikir

Lampung merupakan salah satu daerah destinasi orang asing untuk berwisata, berinvestasi, bisnis, ataupun untuk mengenyam pendidikan. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu fungsi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan sebagai langkah penunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat dari perlintasan orang antar negara.

Pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung meliputi wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam mendukung pengawasan terhadap warga negara asing yang

berada di wilayah Lampung dilakukan melalui 2 cara, yaitu: pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan upaya dalam pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penilaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam mengawasi warga negara asing.

Untuk menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam mengawasi warga negara asing, maka peneliti menggunakan indikator kinerja organisasi publik menurut Sulistiyani dan Rosidah, yaitu: Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan supervisi dan dampak interpersonal. Secara umum kerangka berpikir yang hendak digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitiannya menekankan pada makna daripada generalisasi.⁵¹ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

Tipe penelitian deskriptif menjadikan penelitian ini menitikberatkan pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat fenomena yang diselidiki dari objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya. Pendeskripsian tersebut menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hal. 9.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian agar dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang dinilai dengan menggunakan indikator kinerja menurut Sulistiyani dan Rosidah, terdiri dari:
 - a. Kualitas
Menyangkut kesesuaian hasil kerja dengan yang diinginkan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dilihat dari program/ kegiatan yang ditetapkan serta pencapaiannya.
 - b. Kuantitas
Menyangkut jumlah yang dihasilkan, yakni jumlah lingkaran kegiatan pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.
 - c. Ketepatan waktu
Menyangkut ketepatan waktu Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam menindaklanjuti laporan mengenai keberadaan warga negara asing.
 - d. Efektifitas biaya
Menyangkut penggunaan *resource*⁵² yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dengan manfaat yang didapatkan, yakni pengawasan warga negara asing yang optimal.

⁵² Sumber penghasilan, Sumber, Alat

e. Kebutuhan supervisi

Menyangkut dukungan dan kerjasama *supervisi*⁵³ dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing. Dalam penelitian ini, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung merupakan supervisi dalam membantu, mendukung dan bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

f. Dampak interpersonal

Menyangkut kerja sama dan hubungan baik antar pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dan kerjasama pegawai antar instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Hj. Haniah No. 3 Cut Mutia Rt/ Rw. 021/ 01 Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35214. Adapun alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian tersebut ialah Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan kantor imigrasi yang terletak di ibu kota Provinsi Lampung dan merupakan kantor imigrasi yang luas wilayah kerjanya mencakup 4 kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Lampung. Dengan wilayah kerja yang luas maka diperlukan pengawasan yang ketat

⁵³ Pengawasan utama, Pengontrolan tertinggi

terhadap warga negara asing yang berada di wilayah-wilayah tersebut, sehingga kinerja dari pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung harus dilakukan secara optimal dan maksimal.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁵⁴ Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali informasi langsung dari informan yang dianggap memahami hal-hal mengenai kinerja dan kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa undang-undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

⁵⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009), hal. 157.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Informan

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi langsung melalui wawancara kepada informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Tgl. Wawancara
1	Mat Dauri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kanim I Bandar Lampung	6 Maret 2017
2	Zakaria, S.H., M.A.P.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanim I Bandar Lampung	9 Februari 2017
3	Amrullah Shadiq, S.T.	Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian Kanim I Bandar Lampung	9 Februari 2017
4	Yongki M. Zein	Kepala bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung	14 Maret 2017

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

b. Dokumen

Sumber data ini merupakan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang nantinya digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan

kinerja Kantor Imigrasi itu sendiri. Berikut merupakan daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 4. Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Tentang Keimigrasian
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013	Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
3	Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.14.PR.07.04 Tahun 2003	Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

⁵⁵ Ibid, hlm. 186.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan lain sebagainya.⁵⁶ Adapun dokumen yang diperlukan untuk mendukung keakuratan data dalam penelitian ini yaitu peraturan dan/atau undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik mengolah data menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh.⁵⁷ Berikut langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada data primer yaitu hasil wawancara. Data yang diperoleh dipilah-pilah terlebih dahulu, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting dan dibuat kategori-kategori yang menjelaskan mengenai kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 236.

⁵⁷ Sugiyono, *Op Cit*, hal. 246.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami mengenai kinerja Kantor Imigrasi dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengawasan warga negara asing. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (derajat kepercayaan data), uji *transferability* (derajat keteralihan), uji *dependability* (derajat kebergantungan) dan uji *confirmability* (derajat kepastian).⁵⁸ Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

⁵⁸ Ibid, hal. 270.

1. Uji *Credibility* (Derajat Kepercayaan Data)

Menurut Emzir, kriteria *credibility* melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif kredibel (dapat dipercaya). Uji *credibility* meliputi perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif serta kecukupan referensi.⁵⁹ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan kecukupan referensi.

a. Triangulasi

Menurut Wiliam dalam Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbeda waktu.⁶⁰ Terdapat tiga metode triangulasi:

1. Triangulasi sumber; untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana pandangan yang spesifik.
2. Triangulasi teknik; untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu; dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan sumber data atau teknik pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang berbeda.

⁵⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 79.

⁶⁰ Sugiyono, *Op Cit*, hal. 273.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni perpaduan dari teknik wawancara dan dokumentasi.

b. Kecukupan Referensi

Bahan referensi dalam uji *credibility* adalah adanya pendukung untuk membuktikan data-data yang telah dikumpulkan peneliti. Referensi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman wawancara, gambar atau foto, dokumen, dan lain sebagainya. Referensi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan alat bantu perekam data seperti kamera dan alat perekam suara.

2. Uji *Transferability* (Derajat Keteralihan)

Menurut Emzir, kriteria *transferability* merujuk pada tingkat mana hasil dari penelitian kualitatif dapat ditransfer pada konteks lain.⁶¹ Teknik ini dilakukan peneliti dengan melaporkan dan menguraikan hasil dari penelitian dengan cermat, rinci, dan mendalam. Hasil penelitian tersebut dilampirkan dan disajikan pada hasil dan pembahasan.

3. Uji *Dependability* (Kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian *dependability* dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

⁶¹ Emzir, *Op Cit*, hal. 80.

4. Uji *Confirmability* (Derajat Kepastian)

Menurut Emzir, *confirmability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain.⁶² Dalam penelitian ini, uji kepastian dilakukan dengan mengadakan seminar yang dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing dan pembahas. Uji kepastian dilakukan untuk melihat apakah data hasil laporan bersifat objektif atau tidak. Objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

⁶² Ibid, hal. 81.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sendiri dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Palembang pada tahun 1959. Ketika Kantor Imigrasi Lampung berdiri pada tahun 1959, Kantor Imigrasi Lampung saat itu masih merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Palembang meliputi seluruh wilayah hukum keresidenan Lampung.

Pertama kalinya Kantor Imigrasi Lampung di tempatkan di Jl. Sarinarwa No. 1 Teluk Betung, sampai pada tahun 1972 Kantor Imigrasi Lampung di pindah ke gedung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 133 Bandar Lampung. Setelah status Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung maka pada tahun 1972 tersebut Kantor Imigrasi Lampung diganti penamaannya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang tersebut antara lain meliputi Kota Tanjung Karang/ Teluk

Betung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara serta Pos Imigrasi Pelabuhan laut Panjang.

Pada tahun 1986 terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Departemen Kehakiman sesuai tugas dan fungsi keimigrasian sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung. Sedangkan Pos Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Panjang-Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (saat ini menjadi 3 kabupaten : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran), Pelabuhan Laut TPI Panjang, Pelabuhan khusus di Kabupaten Tuang Bawang. Pada tahun 2004 Kantor Imigrasi Kelas II ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dengan wilayah kerja meliputi 2 kota dan 6 kabupaten.

Pada tanggal 19 Oktober 2009 Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung menempati gedung baru di Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutiah Bandar Lampung dengan Luas Bangunan 1629 M² yang terdiri dari 3 Lantai di atas tanah seluas 2204 M² yang diresmikan pembangunannya oleh Bapak Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2010. Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas II Kota bumi, dan penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang. Sehingga untuk sampai saat ini wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I

Bandar Lampung meliputi 2 kota dan 4 kabupaten serta tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang.

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu kantor imigrasi yang memiliki intensitas tugas yang padat, hal ini dikarenakan Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang merupakan salah satu daerah destinasi orang asing untuk berwisata, untuk berinvestasi bisnis maupun untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan interaksi kegiatan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan jasa keimigrasian terhadap warga negara asing.

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting, terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat publik yang berkenaan dengan kegiatan keimigrasian seperti dalam pengurusan dokumen perjalanan, izin tinggal dan status, visa, penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta berbagai pelayanan keimigrasian lainnya. Melihat rentang wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang cukup luas, maka pengawasan terhadap kegiatan orang asing maupun pemohon jasa keimigrasian dilakukan secara aktif dengan pihak kepolisian dan instansi terkait sampai ke tingkat kabupaten.

2. Lokasi

Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung bertempat di alamat Jalan Hj. Haniah No.3 Cut Mutia RT/RW.021/01 Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35214.

Telepon : (0721)-482828 / 482607
Faks : (0721)-482607
E-mail : kanimbdl@gmail.com
Twitter : @imigrasilampung
Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
Website : www.imigrasi.go.id
imigrasibandarlampung.com

3. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi

Kelas I Bandar Lampung

- a. Visi : “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.
- b. Misi : “Melindungi Hak Asasi Manusia”.
- c. Motto : “Melayani Dengan Tulus”.
- d. Janji Layanan : 1) Kepastian Persyaratan
2) Kepastian Biaya
3) Kepastian Waktu Pelayanan
- e. Kode Etik Pegawai Imigrasi : “M. HH-02.KR.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi”.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

1. Kedudukan

Kantor Imigrasi (disingkat KANIM) adalah unit pelaksana teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

2. Tugas Pokok

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

3. Fungsi

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Status Keimigrasian.
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

C. Wilayah Kerja, Struktur Organisasi dan Jumlah Personil Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

1. Wilayah kerja

Imigrasi Kelas I Bandar Lampung mempunyai 2 kota dan 4 kabupaten wilayah kerja serta tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang. Wilayah kota dan kabupaten tersebut antara lain adalah :

- a. Kota Bandar Lampung
- b. Kota Metro
- c. Kabupaten Lampung Tengah

- d. Kabupaten Pesawaran
- e. Kabupaten Tanggamus
- f. Kabupaten Pringsewu
- g. Pelabuhan Laut Panjang

2. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

Sumber : imigrisibandarlampung.com

Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung jabatan tertinggi dipimpin oleh Kepala Kantor yang memiliki tugas untuk bertanggungjawab, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas pegawai dari setiap seksi yang ada di kantor. Kepala Kantor membawahi lima seksi yang ada di kantor tersebut, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (Sisimfokim).
- c. Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (Lantaskim).
- d. Seksi Status Keimigrasian (Statiskim).
- e. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim).

Dengan struktur organisasi seperti pada **Gambar 2**, Kepala Kantor Imigrasi akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan kerja setiap seksi. Terutama seksi Sisimfokim, Lantaskim, Statiskim dan Wasdakim yang memiliki fungsi umum yaitu memberikan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat, dan Bagian Tata Usaha yang memiliki fungsi umum dalam memberikan pelayanan secara langsung terhadap rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

3. Jumlah Personil

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sampai dengan saat ini memiliki 55 pegawai yang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor : 1 Orang
- b. Kepala Sub Bagian : 1 Orang
- c. Kepala Urusan : 3 Orang
- d. Kepala Seksi : 4 Orang
- e. Kepala Sub Seksi : 8 Orang
- f. Staf Pegawai : 38 Orang

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian dan Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun konsep program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan.
- c. Melaksanakan tugas dibidang umum perkantoran.
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian.

Kassubag tata usaha sendiri membawahi langsung tiga bagian penting di Kantor Imigrasi, yaitu bagian urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum.

Tugas masing-masing bagian tersebut antara lain :

- a. Urusan Keuangan bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan keuangan, mencatat, membukukan, menyimpan dan mengeluarkan buku kas umum anggaran rutin serta membuat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dan juga rekonsiliasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Urusan Kepegawaian bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, melakukan pengawasan terhadap kerja bawahan, memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas, melakukan penilaian terhadap pegawai kantor imigrasi, serta memenuhi semua tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan untuk proses kepegawaian.

- c. Urusan Umum bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, mengolah data barang milik negara, menyusun dan membuat laporan rencana pengadaan dan pengeluaran alat tulis kantor (ATK) dan barang-barang perlengkapan, serta memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan bagian umum.

2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (Sisimfokim)

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat program dan rencana kerja Sisimfokim.
- b. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi, dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
- c. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan pengguna serta pemeliharaan sarana komunikasi.
- d. Membuat laporan hasil evaluasi pada seksi informasi dan sarana komunikasi.

3. Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (Lantaskim)

Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Membuat program dan rencana kerja seksi Lantaskim.
- b. Melaksanakan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / izin keluar dan fasilitas keimigrasian.
- c. Melaksanakan pemberian dokumen perjalanan sesuai dengan aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).
- d. Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian.

Tugas Subseksi Lintas Batas keimigrasian dan Subseksi perizinan keimigrasian antara lain yaitu :

- a. Subseksi lintas batas keimigrasian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor, menandatangani dokumen dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pada Subseksi lintas batas, serta melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas pelabuhan dan instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
- b. Sedangkan tugas dari Subseksi Perizinan keimigrasian yaitu melayani pemohon paspor untuk melakukan pembayaran, photo, sidik jari dan interview, melakukan penyimpanan map permohonan yang sudah diverifikasi dan berkas paspor yang sudah ditanda tangani kepala kantor serta membantu pengembalian paspor yang sudah selesai untuk diserahkan ke pemohon dan map yang telah selesai ke informasi dan sarana keimigrasian.

4. Seksi Status Keimigrasian (Statiskim)

Seksi Status Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membuat program dan rencana kerja seksi status keimigrasian.
- b. Melaksanakan tugas dalam penelaahan status keimigrasian.
- c. Melaksanakan tugas pemberian dalam penentuan status keimigrasian.
- d. Membuat laporan hasil evaluasi seksi status keimigrasian.

Dalam seksi status keimigrasian ini-pun terdapat dua Subseksi yaitu Subseksi penentuan status keimigrasian dan Subseksi penelaahan status keimigrasian yang keduanya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Subseksi Penentuan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan alih status, pemberian Status Keimigrasian (SKIM) serta penentuan status kewarganegaraan.
- b. Tugas Subseksi Penelaahan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), *Visa On Arrival* (VOA) dan melaksanakan pemberian Surat Sumpah (*Affidavit*) serta penelaahan status kewarganegaraan.

5. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim)

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu :

- a. Membuat program dan rencana kerja seksi wasdakim.
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian.
- c. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka projustitia.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing (TIM PORA).
- e. Melaksanakan tindakan administratif pelanggaran keimigrasian.
- f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- g. Membuat laporan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- h. Menyusun, memelihara, dan mengamankan daftar pencegahan dan penangkapan.

Seksi Pengawasan dan Penindakan keimigrasian ini membawahi dua Subseksi yaitu Subseksi pengawasan keimigrasian dan Subseksi penindakan keimigrasian. Adapun tugas dan fungsi kedua Subseksi tersebut, yaitu:

- a. Subseksi Pengawasan Keimigrasian bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengecekan terhadap pelanggaran dan tenaga kerja warga negara asing serta melakukan koordinasi masalah pengawasan orang asing dengan instansi terkait.
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian bertugas untuk membantu tugas seksi wasdakim dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dilihat dari segi kualitas, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap WNA sudah cukup optimal namun belum maksimal dikarenakan kurangnya SDM yang berada di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kualitas kinerja tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dihasilkan, yang didukung pula dengan dibentuknya Tim Pora dan juga pemanfaatan APOA

Dilihat dari segi kuantitas, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan WNA melakukan semua kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, pengawasan tersebut dimulai sejak kedatangan WNA, keberadaan dan kegiatan WNA, hingga WNA tersebut kembali ke negara asal. Namun untuk banyaknya jumlah pengawasan yang dilakukan tidak dapat dipastikan jumlahnya dikarenakan sifat dari pengawasan itu sendiri sesuai dengan laporan atau temuan yang ada di lapangan.

Dari segi ketepatan waktu, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung ketika mengetahui keberadaan, bentuk kegiatan, serta laporan atau temuan mengenai WNA di suatu tempat segera menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan

terhadap WNA tersebut. Namun hal ini selalu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia karena jumlah anggaran yang dimiliki terbatas, sehingga jika ada temuan/ laporan yang lokasinya berada jauh dan sulit dijangkau, maka Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung bekerja sama dengan Tim Pora yang berada di wilayah tersebut untuk memastikan terlebih dahulu kebenaran atas temuan/ laporan yang didapatkan, dan jika temuan/ laporan tersebut akurat maka Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung segera melakukan pengawasan.

Dari segi efektivitas biaya, terlihat bahwa manfaat yang dihasilkan dengan pengeluaran yang dilakukan sesuai, yakni penggunaan *resource* dalam melaksanakan kegiatan pengawasan WNA sudah sesuai dengan peruntukannya. Dari segi kebutuhan supervisi, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung membutuhkan pembinaan, pengarahan serta pengawasan dalam melaksanakan tupoksinya salah satunya dalam melaksanakan pengawasan terhadap WNA. Kebutuhan supervisi yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik.

Dari segi dampak interpersonal, dalam mendukung kinerja yang optimal diperlukan kerja sama dan hubungan komunikasi yang baik antar sesama pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, atau pun kerja sama pegawai antar instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap WNA. Dalam hal ini, dampak interpersonal yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik sehingga pengawasan WNA dapat dilakukan dengan cukup optimal.

Beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pengawasan WNA adalah faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap WNA jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Walaupun kualitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sudah cukup optimal, namun jika jumlah SDM yang ada di kantor Imigrasi tersebut ditambah, maka kualitas kinerja yang dihasilkan akan menjadi lebih maksimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah kurangnya koordinasi dengan pihak sponsor yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan WNA, serta kurangnya koordinasi dengan pihak lain seperti pihak perusahaan dan pihak hotel dalam memberikan pelaporan mengenai keberadaan WNA yang berada di lokasi perusahaan atau hotel tersebut. Juga kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan WNA dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi Kantor Imigrasi

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian termasuk menyosialisasikan manfaat, kegunaan serta cara penggunaan APOA, hal ini dikarenakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan dan

keberadaan WNA dirasa sangat penting. Sosialisasi tersebut bisa melalui media informasi atau melakukan tatap muka secara langsung.

- b. Dengan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota serta Pelabuhan Laut Panjang, sebaiknya Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melakukan penambahan jumlah personil/aparat pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam upaya pengawasan WNA.
- c. Diharapkan koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pora lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan pengawasan WNA. Contohnya melakukan koordinasi lebih dari 1x dalam sebulan.
- d. Perlunya melakukan komunikasi dengan pemerintah, terkait pencegahan masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia, agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan pelarangan bagi WNA dalam menggunakan ideologi asing di Negara Indonesia.

2. Bagi WNA

Bagi WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia ataupun yang sudah tinggal di Indonesia agar lebih memahami dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema ini, sebaiknya tema ini diangkat menjadi persoalan yang lebih luas, seperti mengangkat persoalan kinerja pengawasan terhadap masuknya laten komunis dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirullah dan Budiyono Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Pasolong, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Aksara Bumi.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai (Teori Pengukuran dan Implikasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Victor M dan Juhir Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahriful (James) S.H., H. Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Yudhistira.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan, Lintas Agama*. Bandung: Humaniora.
- Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- _____ . 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Winardi, 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Wursanto, Ignatius. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel dan Jurnal Internet

- Bayu, “Banyak Tenaga Kerja Asing di Lampung Tak Melapor”, diakses dari <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=7832>, pada tanggal 27 November 2016 pukul 20.34
- Ghazaldi, Agung. “Dalam 2 Tahun Terakhir, 99 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung”, diakses dari <http://rri.co.id/post/berita137531/daerah.html>, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 21.58
- Indra, Muhammad. 2008. (Disertasi). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*. Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Jansen, Rikho. “2016 MEA Dimulai, Pengertian Apa Itu MEA Masih Banyak Masyarakat Indonesia Yang Tidak Mengerti”, diakses dari <http://news.hargatop.com/2016/01/04/2016-mea-dimulai-pengertian-apa-itu-mea.html>, pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.15
- Jaya, Tri Purna “Nikahi Pribumi Jadi Modus WNA Tinggal di Lampung”, diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/08/24/340/1471857/nikahi-pribumi-jadi-modus-wna-tinggal-di-lampung>, pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 19.37
- Putri, Kiki Ariska. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. E-journal Ip Fisip Unmul, Vol 4, No 3, 2016: 995-1008. Hal. 6.

Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Universitas Indonesia. Depok.

Widi, Henk. "Imigrasi Lampung Amankan Ratusan Imigran Dalam 3 Tahun", diakses dari <http://www.cendananews.com/2015/04/imigrasi-lampung-amankan-ratusan.html>, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 22.03

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.